

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Lembaga Pendidikan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa:

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya di singkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS.

Menurut Djohar A (2007:376), “Pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan individu siswa menjadi tenaga yang profesional dan siap untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.” Berdasarkan uraian diatas, bahwa dapat disimpulkan sekolah menengah kejuruan adalah substansi yang memiliki tujuan untuk mendidik dan melatih peserta didik menjadi lulusan yang siap terjun ke dunia kerja.

2. Karakteristik SMK

Djojonegoro (1998:37) mengemukakan karakteristik yang harus dimiliki SMK harus mengacu pada:

- a) Sistem pendidikannya ditujukan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja menengah yang siap untuk dalam dunia industri dan usaha.
- b) *Demand-driven* (kebutuhan dunia kerja) menjadi acuan terselenggaranya pendidikan kejuruan.
- c) Keberhasilan peserta didik bersandar pada hands-on atau performa pada dunia kerja.
- d) Kunci sukses keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kejuruan terindikasi melalui pola hubungan kerja sama yang erat antara dunia kerja dan penyelenggara pendidikan kejuruan.

- e) Penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang tepat adalah pendidikan yang tanggap dan berkembang sering kemajuan teknologi.
- f) Pengalaman yang ditawarkan dalam proses pendidikan kejuruan serta bertumpu *pada learning by doing dan hand-on experience*.
- g) Fasilitas yang kekinian sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan kejuruan untuk menyelenggarakan praktik yang mutakhir.
- h) Biaya investasi yang besar penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik SMK harus dilihat dari sistem pendidikan, penyelenggaraan, serta fasilitas dan yang terpenting kualitas peserta didik sehingga munculnya kualitas SMK tersebut.

3. Kurikulum

a) Pengertian Kurikulum

Menurut Hamalik (2011:10), “Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) untuk siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebutlah siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut Harsono (2005), “Kurikulum adalah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional”.

Sedangkan, menurut Sudjana (2005), “Kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan kedalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar

mengajar. Yang terlibat didalam proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan lembaga pendidikan yang direncanakan secara terstruktur dan terprogram yang pelaksanaannya proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

b) Komponen Kurikulum

Komponen-komponen kurikulum saling terkait satu dengan lainnya, kemudian pendidik yang terlibat dan berperan dalam menyelaraskan komponen-komponen kurikulum tersebut. Keputusan yang harus dibuat mengenai tujuan (umum dan khusus) yang hendak dicapai oleh institusi pendidikan.

- 1) Keputusan tentang isi/materi pelajaran yang sesuai yang diyakini untuk mencapai tujuan.
- 2) Setelah isi pelajaran ditentukan, selanjutnya dipilih metode-metode mengajar yang berguna untuk mengorganisasikan dan menyampaikan isi (*content*) tersebut.
- 3) Tahap atau unsur selanjutnya adalah evaluasi yang menggunakan berbagai macam teknik assesmen pendidikan, yang diperlukan dengan maksud mengetahui apakah tujuan-tujuan telah tercapai, yang pada gilirannya menjadi bahan itu membuat keputusan selanjutnya tentang tujuan, isi/materi, dan metode pembelajaran.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam komponen kurikulum adalah cakupan pembelajaran yang didasarkan pada suatu gagasan atau prinsip yang akan menjadi sandaran atau pegangan dalam mengembangkan suatu kurikulum.

c) Tujuan Kurikulum

Menurut Idi (2007:52), Tujuan kurikulum harus merefleksikan hal-hal yang ingin dicapai secara keseluruhan, yang meliputi tujuan domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif adalah tujuan yang diinginkan ke arah pengembangan akal atau intelektual anak didik, domain afektif adalah tujuan yang diinginkan ke arah pengembangan rohani anak didik dan domain psikomotorik adalah tujuan yang diinginkan ke arah pengembangan keterampilan jasmani anak didik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan kurikulum sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang berintegrasi sehingga peserta didik dapat memutuskan pendidikan yang diinginkan untuk jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk pemerataan pendidikan dalam negara.

4. Landasan Hukum Kurikulum Merdeka

Lima landasan hukum yang menjadi acuan terjadinya perubahan menjadi kurikulum merdeka sebagai berikut :

- 1) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022. Menjelaskan Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat, dan Kurikulum Merdeka.

- 2) Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022. Ini menjelaskan Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar Isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi leysan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan: 1) muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) konsep keilmuan; dan 3) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar Isi menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat, dan Kurikulum Merdeka.
- 3) Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022. Menjelaskan Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru.
- 4) Keputusan Kepala BSKAP No.008/H/KR/2022 Tahun 2022 yang menjelaskan Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka. Memuat Capaian Pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur Kurikulum Merdeka.
- 5) Keputusan Kepala BSKAP No.009/H/KR/2022 Tahun 2022 yang menjelaskan Dimensi, Elemen dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka. Memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan

profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum pada kurikulum sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengembangkan kurikulum sesuai kemendikbudristek sampaikan.

5. Peran Guru dalam Kurikulum Merdeka

Menurut Mulyasa (2021), “Pendidik sebagai penggerak merdeka belajar, artinya seorang pendidik yang dituntut untuk mampu bersikap aktif dan semangat, kreatif, inovatif serta terampil guna menjadi fasilitator penggerak perubahan di sekolah. Pendidik sebagai penggerak merdeka belajar pada kurikulum merdeka bukan hanya harus dapat menguasai dan mengajar secara efektif dikelas melainkan juga harus dapat menciptakan lingkungan yang baik dengan membangun kedekatan bersama peserta didik. kemudian pendidik juga dituntut untuk dapat memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sebagai peningkatan dalam cara mengajar.”

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pendidik adalah seseorang yang mengarahkan peserta didik dalam pembelajaran sesuai kurikulum merdeka yang lebih kreatif dan sesuai minat bakat peserta didik sesuai perkembangan zaman seperti sekarang ini dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih.

6. Penyusunan Rencana Pembelajaran Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dimana pelajaran akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Tujuan kurikulum merdeka, yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan pendidik. Sebelum melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka pendidik melakukan penyusunan rencana pembelajaran kurikulum merdeka yang memiliki beberapa langkah sebagai berikut:

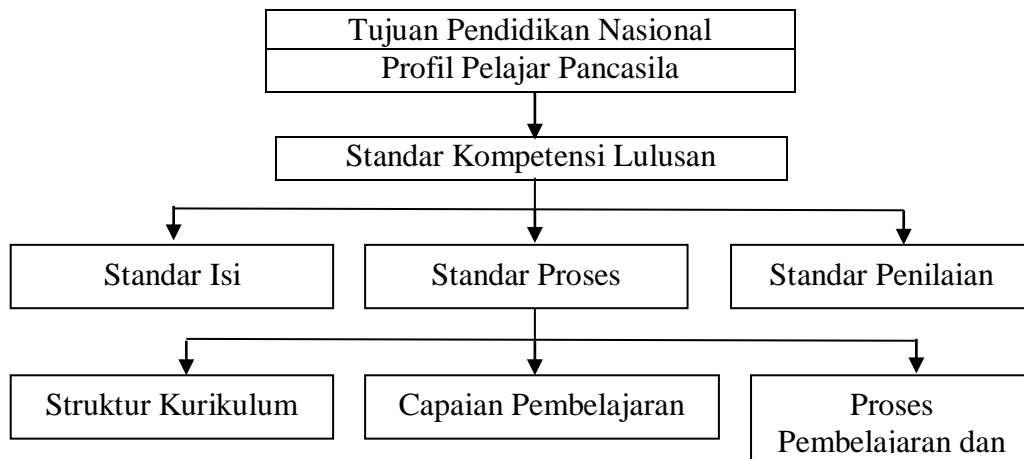
a. Pembagian Kewenangan dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka

Menurut Hadiansyah (2022:68), bahwa kurikulum dianggap sebagai jantungnya pendidikan. Seperti halnya pada manusia, jika jantungnya bermasalah, maka tubuhnya bermasalah, itulah pentingnya kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan. Pada tataran teknis, kurikulum adalah rambu-rambu pendidik dalam mengajar. Fungsinya agar materi yang disampaikan runtut dan mudah dipahami peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum isinya bukan hanya daftar mata pelajaran dan alokasi waktu, tetapi sebuah rancangan yang sistematis.

Dalam diskursus pembangunan pendidikan di Indonesia, perubahan kurikulum selalu diwarnai dinamika menarik. Hal ini mengukuhkan konsep, bahwa kurikulum tidak hanya berdiri pada aras mikro, tetapi menjangkau aras makro yang bertalian dengan konstruksi sosial politik. Hidayat (2011), mengaitkan kurikulum dengan relasi-relasi sosial yang berkepentingan di belakangnya. Kurikulum memiliki relasi dengan politik penguasa, negara dengan

sekolah, maupun sekolah dengan masyarakat. Oleh karena itu, "pemeo ganti menteri ganti kurikulum" selalu terdengar, setiap ada perubahan kurikulum.

Kehadiran kurikulum merdeka bisa dikatakan bagian dari konstruksi gagasan tersebut. Oleh karena itu, secara operasional perlu dilakukan pembagian kewenangan dalam pengembangannya. Adapun prinsip dalam pengembangan kurikulum merdeka adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Terkait pembagian kewenangan dalam pengembangan kurikulum merdeka, dapat dilihat pada bagan berikut.



Sumber: Kemendikbudristek (2021);Balibangbuk (2022)

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, dan standar nasional pendidikan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah menetapkan kerangka dan struktur kurikulum, Capaian Pembelajaran (CP) seluruh mata pelajaran, serta prinsip pembelajaran dan assesmen. Adapun CP untuk muatan lokal (pembelajaran bahasa daerah), dapat disusun oleh satuan pendidikan atau pemerintah daerah. Adapun kewenangan satuan pendidikan adalah: menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran dan assesmen.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam awal penyusunan rencana pembelajaran kurikulum merdeka dilakukan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan dalam menentukan tujuan pendidikan, struktur kurikulum, serta capaian pembelajaran seperti apa yang didapat dalam menggunakan kurikulum tersebut.

b. Pengertian dan Prinsip Penyusunan KOSP

Menurut Hadiansyah (2022:69), bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus memiliki kurikulum operasional sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, kurikulum yang penyusunannya menjadi kewenangan sekolah ini disebut dengan Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). KOSP ini disusun oleh sekolah sebagai upaya untuk membantu kelangsungan proses pembelajaran. Dalam pengembangannya, KOSP harus memenuhi prinsip-prinsip yang utuh, menggambarkan seluruh potensi sekolah dan refleksi semua warga sekolah atas dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik.

Dalam penyusunan KOSP, tim pengembang kurikulum sekolah harus mempertimbangan prinsip-prinsip berikut :

1)	Prinsip 1 Berpusat pada peserta didik Muatan kurikulum harus memperhatikan keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan KOSP.
2)	Prinsip 2 Kontekstual Menunjukkan kekhasan dan menggambarkan karakteristik

	sekolah, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industry (khusus SMK), dan memberikan ruang inklusif (khusus SIB).
3)	Prinsip 3 Esensial Memuat semua unsur informasi penting dan utuh yang dibutuhkan dan digunakan di sekolah. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami.
4)	Prinsip 4 Akuntabel Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat dipertanggung jawabkan karena perencanaannya berbasis data dan aktual.
5)	Prinsip 5 Melibatkan berbagai pemangku kepentingan pengembangan kurikulum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain: komite, orang tua, organisasi, industri dan dunia kerja untuk SMK, di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya.

Sumber: *Kemendikbudristek (2022)*

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa satuan pendidikan harus memiliki kurikulum operasional untuk membantu kelangsungan proses pembelajaran agar mencapai 5 prinsip yang ada pada penyusunan KOSP.

c. Acuan, Komponen, dan Dasar Panduan Penyusunan KOSP

Hadiansyah (2022:70), bahwa langkah ketiga dari penyusunan rencana pembelajaran kurikulum merdeka adalah acuan, komponen, dan dasar panduan penyusunan KOSP sebagai berikut:

1) Acuan Penyusunan KOSP

Menurut Kemendikbudristek (2021), sekolah harus menyusun visi, misi, dan tujuan: pendidikan yang mengacu pada Profil Pelajar Pancasila, yakni pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkepribadian, dan berperilaku sesuai nilai-nilai pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia

unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.

Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Sebagai acuan teknis dalam penyusunan KOSP, profil pelajar Pancasila dibagi menjadi enam kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan integrasi pengembangan keenam dimensi. Menurut SK Kepala BSKAP No. 009 Tahun 2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen profil pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka, enam dimensi yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan KOSP adalah: (1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) Berkebinekaan global, (3) Bergotong royong, (4) Mandiri, (5) Bernalar kritis, dan (6) Kreatif.

Dimensi-dimensi di atas, menunjukkan bahwa profil pelajar pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai

jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Dengan demikian, maka posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam penyusunan KOSP, yaitu sebagai gambaran: (1) tujuan jangka panjang proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, (2) kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan warga sekolah, dan (3) benang merah yang menyatukan segala praktik di sekolah.

2) Komponen Dokumen KOSP

Berdasarkan acuan di atas, maka ada beberapa komponen dalam KOSP. Komponen- komponen ini harus digambarkan secara lugas, jelas, dan berbasis data aktual yang dimiliki oleh sekolah. Oleh karena itu, isi dari komponen-komponen ini bisa dievaluasi setiap 4-5 tahun.

Karakteristik Satuan Pendidikan	Menggambarkan karakteristik, keunikan, dan kekhasan sekolah (peserta didik, sosial, budaya, pendidik, dan tenaga kependidikan).
Visi Misi, dan Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. 2) Visi dimaknai sebagai nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. 3) Misi adalah nilai-nilai penting yang dipegang selama menjalankan visi. 4) Misi adalah gambaran jawaban bagaimana sekolah untuk mencapai visi. 5) Tujuan menggambarkan tahapan-tahapan (<i>milestone</i>) penting dan selaras dengan misi. 6) Tujuan bisa dianggap sebagai strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Pengorganisasian Pembelajaran	Cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu beban belajar dan cara sekolah dalam mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian CP dan profil pelajar Pancasila. Pengorganisasian pembelajaran dibagi ke dalam tiga bagian (intrakurikuler, berisi muatan/mata pelajaran dan muatan tambahan

	lainnya jika ada (mulok), (2) proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut, dan (3) ekstrakurikuler, gambaran kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk matriks/tabel di sekolah.
Rencana Pembelajaran	Rencana pembelajaran terdiri atas: (1) lingkup sekolah, seperti: silabus atau alur pembelajaran/unit mapping lengkap dengan gambaran besar asesmen dan sumber belajar yang mencakup kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar pancasila, serta program prioritas satuan pendidikan (2) lingkup kelas, seperti: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar (MA).
Pendampingan Evaluasi, dan Pengembangan Profesional	Kegiatan berkelanjutan di sekolah dalam upaya mengevaluasi ketercapaian program dan mengembangkan hal-hal yang belum tercapai atau tindak lanjut kegiatan ke depan.
Lampiran	Berisi contoh-contoh modul ajar, modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (PS), dan dokumen lain yang mendukung dokumen KOSP.

Sumber: *Kemendikbudristek (2022)*

3) Dasar Panduan Penyusunan KOSP

Dasar panduan penyusunan KOSP adalah kerangka dan struktur kurikulum. Kerangka berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam konteks luas dan jangka panjang. Kerangka dasar ini menjadi kompas dalam menunjukkan arah pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, kerangka dasar kurikulum disusun dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berikut kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tujuan Pendidikan Nasional	Tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila.
Profil Pelajar Pancasila	Profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan

	<p>Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Dari perspektif penyusunan kurikulum, profil pelajar Pancasila adalah tujuan besar (alm) atau aspirasi yang perlu dicapai, atau yang disebut juga dengan long-term <i>outcomes</i> (luaran jangka panjang).</p> <p>Profil pelajar pancasila merupakan interpretasi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia, yang digunakan sebagai rujukan penyusunan standar nasional pendidikan dan kurikulum.</p>
Standar Nasional Pendidikan	Standar pendidikan yang diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran.
Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler, termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Khusus PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran dan program lainnya. Khusus SMK ditambah dengan pengembangan karakter dan budaya kerja sebagai wadah untuk penguatan profil pelajar Pancasila, dan khusus SLB ditambah dengan keterampilan pilihan dan program Kebutuhan Khusus.
Prinsip Pembelajaran dan Assesmen	Prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di sekolah.
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran (CP) merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Pada jenjang PAUD, capaian pembelajaran telah memasukkan esensi dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila sehingga capaian pembelajaran dapat digunakan sebagai arus utama pembelajaran.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa acuan adalah

harus menyusun visi, misi dan tujuan pendidikan yang mengacu pada Profil

Pelajar Pancasila, komponen adalah gambaran lugas, jelas dan berbasis data yang aktual, dan dasar panduan penyusunan KOSP adalah kerangka dan struktur kurikulum yang akan dicapai dalam jangka waktu yang panjang.

d. Langkah-langkah Penyusunan KOSP

Hadiansyah (2022:74), bahwa sebagai dokumen sekolah, KOSP harus bersifat dinamis diperbarui secara berkesinambungan. Selain itu, KOSP harus menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan, dan terus dikembangkan oleh sekolah. Artinya, bahwa proses penyusunan KOSP harus bersifat: (1) tetap, mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan (2) fleksibel atau dinamis, mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum, sesuai karakteristik dan kebutuhan sekolah. Penyusunan dokumen KOSP, sebaiknya dimulai dengan memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Setelah itu, pihak satuan pendidikan menyusunnya dengan alternatif langkah-langkah berikut.

1) Menganalisis Karakteristik Satuan Pendidikan

Menganalisis karakteristik dan keunikan satuan pendidikan berbasis data aktual. Analisis harus dilakukan secara komprehensif, dan reversibel (bolak-balik) antara analisis lingkungan belajar satuan pendidikan, visi misi satuan pendidikan, serta tujuan dan strateginya. Pada proses analisis ini, satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai cara untuk menyelaraskan antar komponennya. Dalam hal ini, pihak satuan pendidikan penting melakukan analisis karakteristik

satuan pendidikan dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi anggota komunitas, dan menjadikan visi misi sebagai kompas.

2) Merumuskan Visi, Misi, dan Tujuan

Tim kurikulum satuan pendidikan merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan ini nantinya akan menjadi referensi arah pengembangan dan menunjukkan prioritas satuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan yang dirumuskan satuan pendidikan harus berpusat pada peserta didik.

3) Pengorganisasian Pembelajaran

Memformulasikan pengaturan pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu pembelajaran Intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, satuan pendidikan dapat menyusun kegiatan ekstrakurikuler.

Intrakurikuler	Pembelajaran berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada (mulok), penetapan konsentrasi, dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk SMK atau magang untuk SLB.
Profil Pelajar Pancasila	Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui tema dan pengelolaan proyek

	berdasarkan dimensi dan fase.
Ekstrakurikuler	Kegiatan kurikuler yang dilakukan di luar jam belajar di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.

4) Menyusun Rencana Pembelajaran

Sekolah menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran pada dasarnya terbagi dua yaitu ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas. Ruang lingkup satuan pendidikan, yakni penyusunan alur tujuan pembelajaran atau silabus. Dalam ruang lingkup satuan pendidikan, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran atau silabus mata pelajaran berfungsi mengarahkan satuan pendidikan dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, dan terukur. Ruang lingkup kelas, yakni penyusunan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran pada ruang lingkup kelas, satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi, atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah, dan cukup melampirkan beberapa contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran. Dalam merancang pembelajaran, satuan pendidikan perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan

asesmen harus digunakan secara terintegrasi sebagai pertimbangan utama dalam merancang struktur kurikulum satuan pendidikan.

- 5) Merancang Pendampingan, Evaluasi dan Pengembangan Profesional Sekolah secara berkesinambungan melaksanakan evaluasi berdasarkan proses refleksi dan pemberian umpan balik. Selain itu, pendidik pun dapat melakukan refleksi mandiri terhadap kriteria kesuksesan yang telah ditetapkan (tujuan belajar, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila), Evaluasi KOSP dapat dilaksanakan secara periodik, baik per hari, per unit belajar, per semester, atau per tahun.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran dan KOSP, antara lain: (1) evaluasi dilakukan secara mandiri dan berkala oleh satuan pendidikan, (2) evaluasi pembelajaran dapat mengukur keberhasilan pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran, (3) evaluasi dapat mengukur keberhasilan kepala satuan pendidikan dan pendidik dalam menjalankan seluruh program pendidikan yang direncanakan dengan tujuan untuk memahami apakah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan telah tercapai, (4) sasaran evaluasi saling berkaitan antara evaluasi pembelajaran dan evaluasi kurikulum itu sendiri, dan (5) evaluasi dikelola oleh para kepala satuan pendidikan dan/atau pendidik yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini.

Adapun prinsip-prinsip melakukan evaluasi, di antaranya: (1) menetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan; (2) Menetapkan data/informasi yang ingin didapatkan dalam kegiatan peninjauan; (3) menentukan bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan data/ informasi yang diinginkan; (4) merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi pendidik dan pelaksana program; (5) menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur.

Selanjutnya, terkait dengan pendampingan dan pengembangan profesional, harus ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi pendidik, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Kepala satuan pendidikan merancang dan melakukan proses pendampingan dan pengembangan profesional sesuai kebutuhan sebagai tindak lanjut dari hasil pengamatan dan evaluasi dengan melibatkan pengawas.

Kepala satuan pendidikan dan pengawas dapat memainkan peran dalam berbagai contoh pendampingan dan pengembangan profesional yang bisa dilakukan di satuan pendidikan, seperti berikut.

- 1) *Coaching*, yaitu proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah.
- 2) *Mentoring*, yaitu proses pendampingan dengan berbagi pengalaman/pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala.

- 3) Pelatihan, yaitu proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja, dengan narasumber internal atau eksternal (menyesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 langkah dalam penyusunan KOSP yang dimana langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara sistematis agar penyusunan rencana pembelajaran kurikulum merdeka berjalan dengan baik.

e. Sistematika Dokumen KOSP

Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum sistematika dokumen KOSP alternatifnya sebagai berikut.

KURIKULUM OPERASIONAL SD/SMP/SMA*... Tahun Pelajaran 2022/2023
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Rasional
B. Karakteristik Satuan Pendidikan
1. Karakteristik Sosial Budaya
2. Karakteristik Geografis
3. Karakteristik Peserta Didik
4. ...
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan
BAB III PENGORGANISASIAN PEMBELAJARAN
A. Intrakurikuler
B. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
C. Ekstrakurikuler
D. Strategi dan Pendekan Pembelajaran

- E. Asesmen Pembelajaran
- F. Layanan Pendidikan Inklusi
- G. Kalender Pendidikan

BAB IV PENUTUP

- A. Pendampingan, Pengembangan Keprofesionalan, dan Evaluasi
- B. Simpulan

LAMPIRAN

1. Peraturan-Peraturan
2. Dokumen Analisis Karakteristik Sekolah
3. Pengaturan Jumlah Jam Pembelajaran
4. Pengembangan Diri dan Jenis Ekstrakurikuler
5. Contoh Modul Ajar
6. Contoh Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
7. Contoh Rubrik/Instrumen Asesmen

Sistematika di atas hanyalah contoh, setiap satuan pendidikan dapat menyusun sistematika yang lebih lengkap. Hal yang terpenting yaitu, setiap dokumen harus disusun secara lugas, jelas, dan mudah dipahami. Selain itu, secara substantif dapat menggambarkan karakteristik dan keunikan satuan pendidikan.

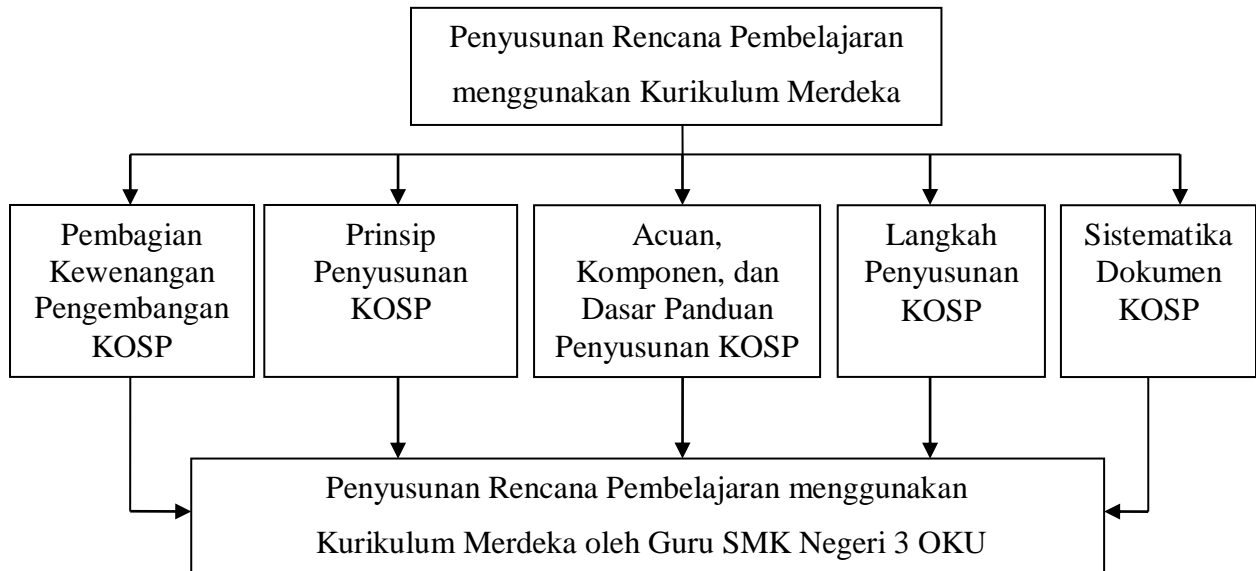
B. Kajian Penelitian Relevan

Berikut adalah kajian penelitian relevan yang berhubungan dengan penelitian ini :

1. Penelitian yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk (2022) berjudul “Implementasi kurikulum merdeka belajar di SMK Pusat Keunggulan”. Hasil penelitian ini menunjukkan Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum merdeka belajar memanglah masih tahap pengembangan dan pengujian lapangan sebelum benar-benar diterapkan di seluruh sekolah di setiap jenjangnya oleh pemerintah. Akan tetapi semua SMK PK yang telah menerapkan kurikulum ini menyambut dengan antusias meskipun beberapa masih terdapat kendala dalam penerapannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anridzo dkk (2002) berjudul “ Implementasi Supervisi Klinis dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa dalam supervisi klinis terdapat perencanaan penerapan kurikulum merdeka di SDN 2 Jagong, Kunduran, Blora, Jawa Tengah dengan menentukan rancangan rencana supervisi klinis sebelum melakukan supervisi klinis. Kemudian pelaksanaan supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka di SDN 2 Jagong, Kunduran, Blora, Jawa Tengah terkendala ketika pelaksanaan karena kurikulum merdeka masih terlalu dini untuk di terapkan dan rata-rata masih menggunakan kurikulum 13 sehingga diperlukan evaluasi untuk menindaklanjuti apa saja yang perlu diperbaiki.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarsih dkk (2022) berjudul “ Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak di Sekolah Dasar”. Hasil penelitian ini ditemukan adanya kurikulum merdeka yang menjadi acuan di sekolah penggerak, yang menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, rasa kebhinekaan. Kepala sekolah penggerak mendorong berbagai macam program partisipatif, unik, dan banyak inovasi. Memupuk kerja sama dengan guru-guru yang mendukung pemimpinya berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah penggerak.

C. Kerangka Konseptual



Bagan 2.1 *Kerangka Konseptual*